

POLITIK IDENTITAS PADA MASYARAKAT BUTTA TURATEA JENEPONTO

Syarifuddin^{1*}, Jumadi², Muhammad Syukur³, Syamsu A. Kamaruddin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Makassar, Indonesia

^{1*}syarifuddin7987@gmail.com, ²jumadi@unm.ac.id, m.syukur@unm.ac.id,

³syamsu.k@unm.ac.id

Abstract

This service aims to increase public knowledge in more depth regarding the phenomenon of identity politics that occurs in the Butta Turate community in Jeneponto, especially during regional head elections. The method offered in implementing the service that will be carried out is the sustainable community approach, an approach that focuses on increasing capacity at the non-individual community level, a sustainable community that has independence and social achievement, where the team is actively involved in providing persuasive assistance (inservice) as a solution in increasing public knowledge regarding the phenomenon of identity politics. The results of the service show an increase in public knowledge about identity politics as a basis for the struggle for power, including three types of identity, namely ethnic identity, religious identity and nobility identity. Apart from that, the public is also able to understand the factors that influence identity politics in the Butta Turatea Jeneponto community, namely a hierarchical society, political polarization, and government regulations.

Keywords: *identity politics; power struggle*

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat lebih mendalam terkait dengan fenomena politik identitas yang terjadi pada masyarakat Butta Turate di Jeneponto utamanya saat terjadi pemilihan kepala daerah. Metode yang ditawarkan dalam pelaksanaan pengabdian yang akan dilakukan adalah pendekatan sustainable community, pendekatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas di tingkat komunitas non-individual, komunitas berkelanjutan yang memiliki kemandirian dan prestasi sosial, dimana tim terlibat aktif memberikan pendampingan (inservice) secara persuasif sebagai solusi dalam peningkatan pengetahuan Masyarakat terkait fenomena politik identitas. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pengetahuan Masyarakat tentang politik identitas sebagai basis perebutan kekuasaan meliputi tiga jenis identitas yaitu identitas etnis, identitas agama, dan identitas kebangsawanan. Disamping itu Masyarakat juga mampu memahami faktor-faktor yang memengaruhi politik identitas pada masyarakat Butta Turatea Jeneponto ialah masyarakat yang hierarkis, polarisasi politik, dan regulasi dari pemerintah.

Kata Kunci: *politik identitas; perebutan kekuasaan*

1. PENDAHULUAN (Introduction)

Analisis Situasi

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak setiap warga negara yang tertuang di dalam amanat undang-undang dasar. Jaminan hak bagi setiap warga negara merupakan perwujudan dari pemerataan kesempatan bagi setiap individu. Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi yang bermakna kedaulatan berada di tangan rakyat senantiasa mengalami perkembangan. Banyak problematika yang dihadapi oleh sistem demokrasi Indonesia salah satunya ialah persoalan keanekaragaman yang dapat memicu ketidakharmonisan atau disintegrasi.

Sentimen dan perpecahan akibat perebutan kekuasaan menjadi isu yang terus berkembang dan terus hidup di dalam sistem demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Tidak jarang perebutan kekuasaan melibatkan identitas suatu kelompok atau suku bangsa untuk menjatuhkan kelompok atau pihak lainnya. Perbedaan politik identitas di Indonesia menjadi penting untuk dikaji sebagai upaya menarik benang merah dari perbedaan yang ada sehingga

stabilitas politik tetap terjaga (Nursalam et al., 2016). Sebagai negara yang dilatarbelakangi oleh berbagai keanekaragaman atau dikenal dengan multikulturalisme, Indonesia telah membuktikan dari zaman kemerdekaan hingga saat ini kesatuan dapat dipelihara (Lestari, 2018).

Penguatan identitas politik dan representasi politik secara otomatis muncul sebagai dampak dibukanya kran partisipasi politik yang dimulai sejak era reformasi hingga sekarang. Proses demokrasi di Indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak terlepas dari orientasi identitas agama dan etnis. Agama dan etnis menjadi orientasi identitas yang dapat digunakan sebagai peluru dalam perebutan kekuasaan dan politik sehingga demokrasi pun dinodai oleh politik identitas yang dapat memecah belah persatuan (Nasrudin, 2018).

Jenepono yang dijuluki sebagai Butta Turatea merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sistem politiknya tampak didominasi oleh kelompok atau golongan tertentu yaitu golongan bangsawan. Identitas sebagai keturunan bangsawan atau karaeng kemudian melahirkan politik identitas yang digunakan untuk meraup dukungan atau suara saat dilaksanakan pesta demokrasi berupa pilkada.

Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Identitas yang bermakna jati diri yang melekat dapat dijadikan sebagai tameng dan peluru untuk menjatuhkan lawan politik ketika identitasnya berseberangan dengan identitas wilayah atau masyarakat yang akan dipimpinya (Haboddin, 2012).

Begitu pula ketika identitas yang dibawa memiliki citra yang positif dan memiliki nilai atau prestise yang mampu mengangkat derajat maka identitas tersebut dipakai untuk memberikan nilai tambah bagi seorang calon kepala daerah. Politik identitas memiliki pengaruh yang signifikan bagi pertarungan politik sebab dapat memengaruhi asumsi dan pilihan masyarakat nantinya (Bakri, 2015).

Politik identitas mengaitkan konsep “pantas” dan “tidak pantas” seseorang dipilih dalam ajang perpolitikan. Identitas dapat menjatuhkan juga dapat meningkatkan kepercayaan atau elektabilitas. Oleh karena itu, di tahun-tahun politik marak terjadi politik identitas sebagai salah satu strategi untuk meraup suara dan menarik simpati dari masyarakat luas. Politik identitas layaknya politik uang yang senantiasa menggelayuti sistem demokrasi apalagi berkaitan dengan perpolitikan di daerah-daerah yang rentan terjadi politik identitas.

Permasalahan Masyarakat

Permasalahan yang dialami oleh Masyarakat Turatea Jenepono sebagai berikut:

- a. Ketidakharmonisan sosial terjadi dikarenakan adanya dominasi golongan tertentu yang mempraktekkan gerakan politik yang bernuansa politik identitas untuk memperoleh kekuasaan dalam panggung politik.
- b. Disintegrasi sosial disebabkan adanya tindakan individu dan kelompok yang melahirkan sejumlah gerakan sosial yang ditunggangi oleh banyak kepentingan-kepentingan politik, perbedaan pandangan dan pilihan politik yang mengaitkan konsep “pantas” dan “tidak pantas” yang dikemas dalam identitas politik.

2. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Langkah-langkah dalam melaksanakan solusi dari permasalahan mitra adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat dimana dalam kegiatan ini tim akan terjun langsung ke lapangan mengunjungi lokasi masyarakat berada kemudian mengumpulkan sejumlah masyarakat pada tempat yang telah ditentukan untuk melakukan sosialisasi dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang fenomena politik identitas.
2. Melakukan pendampingan (*inservice*) secara persuasif kepada masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan Masyarakat terkait fenomena politik identitas secara terperinci sehingga diketahui perkembangannya, kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi melalui prosedur analisis (Sugiyono, 2010). Disamping itu dilakukan mengumpulkan dokumen pendukung sebagai basis data dalam melakukan pengabdian (Rukajat, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

Capaian pada pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada Masyarakat Turatea Jeneponto. Adapun bentuk pelatihan yang diberikan kepada Masyarakat Turatea Jenponto sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi kepada Masyarakat terkait Politik Identitas Sebagai Basis Perebutan Kekuasaan

Dalam proses demokratisasi di Indonesia upaya untuk mencapai masyarakat yang demokratis secara maksimal, satu hal yang diupayakan adalah mengurangi dominasi elite politik pusat dalam proses pengambilan keputusan. Usaha untuk memperkecil sentralisasi kekuasaan dan mengurangi dominasi elite pusat ditempuh penyerahan kewenangan pusat kepada daerah atau kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Memberikan sosialisasi kepada Masyarakat dengan memhamkan terkait Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah direvisi agar pada proses penyelenggaraannya sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah peristiwa politik yang mencerminkan perwujudan demokrasi di daerah. Dengan adanya pilkada, proses demokratisasi berlangsung hingga tingkat lokal. Pilkada langsung oleh masyarakat dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat menyalurkan aspirasi mereka secara terbuka dan juga untuk mendorong partisipasi politik aktif dari masyarakat setempat. Proses tersebut berimplikasi pada kemajuan demokrasi di Indonesia, hal itu dapat memaksimalkan peran aparatur negara di daerah dan mengembangkan peran masyarakat dalam melaksanakan kontrol sosial (Zharfandy, 2016).

Politik identitas dapat menjadi basis perebutan kekuasaan. Sebab identitas dapat memengaruhi pilihan masyarakat dan mampu menggiring opini dan asumsi di tengah-tengah masyarakat. Politik identitas dapat berupa identitas etnis, agama, hingga kebangsawanan. Identitas-identitas ini mencuat ketika dilaksanakan pemilihan kepala daerah atau pesta demokrasi dalam memilih pemimpin daerah.

Identitas berupa etnis amat penting keberadaannya karena etnis bukan hanya berkaitan dengan identitas kolektif semata tetapi juga berkaitan nilai-nilai kearifan, pelestarian budaya, dan eksistensi. Begitu pentingnya identitas etnis ini sehingga banyak calon kepala daerah yang berlomba-lomba untuk mengusung tema kampanye yang berbau etnis dalam rangka mendulang

suara. Sebab ketika masyarakat mengetahui jika calon kepala daerah tersebut seetnis dengan mereka maka timbul kepercayaan dan simpati dari masyarakat. Mereka merasa satu dan sama, hal ini tentunya berbeda ketika calon kepala daerah berasal dari identitas yang berbeda dengan pemilihnya. Kedekatan batin dan kesamaan menjadi sulit untuk terbangun karena berasal dari latar budaya yang berbeda.

Identitas etnis ini dapat menggunakan bahasa sebagai media untuk menarik simpatian. Penggunaan bahasa daerah yang melambangkan etnis tertentu akan mampu menarik suara masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Emile Durkheim bahwa bahasa sebagai fakta sosial, maka bahasa daerah memiliki kemampuan untuk memberikan citra kedaerahan dan semangat lokal bagi calon kepala daerah tertentu.

Identitas yang kedua dalam politik identitas yaitu identitas agama. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Jeneponto ialah agama Islam. Sebagai penganut agama Islam, maka tentunya calon kepala daerah berlomba-lomba untuk tampil agamis dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah pemimpin yang taat beragama dan peduli dengan rakyatnya.

Agama sebagai identitas menyebabkan calon kepala daerah yang di luar agama Islam akan terkerdilkan dan mendapatkan simpati yang kurang daripada calon kepala daerah yang menganut agama Islam. Apalagi di dalam ajaran Islam, umat muslim dianjurkan untuk memilih pemimpin yang seagama dan baik akhlaknya. Sehingga calon kepala daerah yang tidak beragama Islam memiliki kesempatan terpilih yang terbatas.

Identitas yang ketiga yaitu kebangsawanan atau dalam budaya Makassar disebut keturunan *karaeng*. Keturunan *karaeng* masih menempati strata yang tinggi dalam pandangan masyarakat. Terdapat kecenderungan untuk memilih pemimpin daerah yang keturunan bangsawan sebab masyarakat masih memegang teguh kebiasaan terdahulu dan sistem feodalisme yang masih menunjukkan eksistensinya.

Karaeng dalam stratifikasi masyarakat Makassar menempati strata tertinggi. Oleh karena itu, keturunan bangsawan yang maju dalam ajang pemilihan kepala daerah memiliki peluang untuk terpilih yang besar. Identitas bangsawan ini dimanfaatkan oleh calon kepala daerah untuk ditonjolkan dan dijadikan sebagai media dalam memperoleh dukungan yang massif di tengah-tengah masyarakat.

Identitas bangsawan yang masih dianggap tinggi dan mulia bagi masyarakat menyebabkan kerugian bagi calon kepala daerah yang tidak beridentitas bangsawan. Sehingga tidak jarang yang mengakui dirinya keturunan bangsawan padahal tidak sebab keinginan untuk dipilih oleh masyarakat dan menang dalam pemilihan. Identitas bangsawan yang diusung membuat calon kepala daerah melangkah maju daripada kandidat lainnya tidak beridentitas demikian.

Kebangsawanan yang berpengaruh pada setiap momen-momen politik lokal ini berasal dari persaingan untuk memperebutkan kekuasaan. Perebutan kekuasaan menyebabkan para calon kepala daerah berusaha menonjolkan dirinya dan identitas yang sekiranya mampu menarik perhatian dan empati dari masyarakat, seperti contohnya identitas kebangsawanan yaitu keturunan *karaeng*.

2. Memberikan pendampingan (*inservice*) secara persuasif kepada masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan Masyarakat terkait fenomena politik identitas dan faktor-faktor yang memengaruhi politik identitas

Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi politik identitas di Butta Turatea Jeneponto. Berbagai faktor tersebut saling memengaruhi dan bertumpang tindih dalam membentuk politik identitas. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi terciptanya politik identitas tersebut yaitu sebagai berikut.

Pertama, masyarakat hierarkis. Masyarakat hierarkis senantiasa menjaga sistem yang telah terjalin sejak dahulu. Mereka memiliki tingkatan kedudukan atau status yang membedakan satu golongan atau kelompok dengan golongan atau kelompok lain. Masyarakat yang hierarkis juga merupakan perwujudan dari hubungan patron-klien. Patron yang diartikan sebagai pihak yang memiliki wewenang, kekuasaan, dan pengaruh, serta superior. Klien pula adalah kelompok yang diperintah, kurang memiliki kuasa, bawahan, dan inferior.

Masyarakat biasa merupakan contoh dari klien ini sedangkan keturunan bangsawan atau karaeng menjadi patron yang memiliki kekuatan atau power untuk berkuasa dan mengatur urusan masyarakat. Masyarakat yang hierarkis senantiasa menjaga strata dan menganggap bahwa pemerintahan hanya etis diisi oleh keturunan bangsawan sesuai dengan kebiasaan dan sistem yang telah berlaku sejak dahulu.

Kedua, polarisasi politik. Sejak dahulu terjadi polarisasi politik yaitu pembagian atau penggolongan kelompok menjadi dua bagian yang berlawanan secara politik. Ketika memasuki masa-masa pemilihan maka masyarakat menjadi terpolarisasi secara politik. Para calon kepala daerah berupaya untuk memenangkan pemilihan sehingga perbedaan pilihan ini akan menciptakan polarisasi dan perpecahan politik di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, regulasi pemerintah. Faktor yang terakhir adalah regulasi pemerintah (kebijakan desentralisasi dan pemilihan umum). Regulasi pemerintah yang dimaksud adalah adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dan pemilihan umum. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan produk sistem yang memang sudah ada sejak kemerdekaan, namun realisasi dan sinkronisasi dengan pemilihan umum baru dirasa sejak reformasi bergulir. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat menjadi pemicu kebangkitan politik identitas yang pada rezim Orde Baru dapat diredam sentimen etnisitas dan kewilayahan tersebut.

Dari kondisi tersebut menjadi sebuah keharusan kepada pengabdian untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuannya memahami fenomena dan faktor-faktor yang mempengaruhi politik identitas pada Masyarakat Turatea Jeneponto. Sehingga pemilihan kepala daerah di Jeneponto menjadi ruang kontestasi yang terbuka bagi masyarakat kabupaten Jeneponto. Sehingga ruang perebutan kekuasaan terbuka lebar untuk menjadikan identitas sebagai basisnya. Pemilihanpun tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang lebih daripada kelompok lain. Hadirnya desentralisasi menyebabkan munculnya gejala berupa politik identitas yang tengah menjamur pada sendi-sendi perpolitikan dalam pemilihan kepada daerah di daerah Butta Turatea tersebut. Sehingga melalui sosialisasi dan pendampingan yang dikemas dalam wujud pengabdian kepada Masyarakat bisa menjadi salah satu alternatif solusi tergerusnya politik identitas dikarenakan Masyarakat sudah memiliki basis pengetahuan tentang roda perpolitikan di Butta Turatea Jeneponto.

4. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan tentang politik

identitas sebagai basis perebutan kekuasaan di Butta Turatea Jeneponto yang terbagi menjadi tiga jenis identitas yaitu identitas etnis, identitas agama, dan identitas kebangsawanan. Etnis Makassar merupakan etnis mayoritas di Jeneponto, Islam menjadi agama yang dianut sebagian besar masyarakatnya, dan karaeng masih dipandang sebagai strata tinggi yang dapat menarik simpati dan dukungan masyarakat. Selanjutnya pendampingan yang diberikan kepada Masyarakat untuk memperdalam pemahaman terkait fenomena dan faktor-faktor yang memengaruhi politik identitas pada masyarakat Butta Turatea Jeneponto meliputi faktor masyarakat yang hierarkis atau di dalamnya masih terdapat tingkatan atau pola hubungan patron-klien. Kedua, adanya polarisasi politik yang memecah-mecah masyarakat secara politik. Ketiga, regulasi pemerintah yang memunculkan desentralisasi sehingga membuka keran politik identitas.

5. DAFTAR PUSTAKA (*Reference*)

- Bakri, H. (2015). Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon. *The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 51–60. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/133/pdf>
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 116–134.
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 19–30.
- Nasrudin, J. (2018). Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34–47.
- Nursalam, Suardi, & Syarifuddin. (2016). Teori Sosiologi Klasik, Modern, Posmodern, Saintifik, Hermenutik, Kritis, Evaluatif dan Integratif. In M. Akhir (Ed.), *Writing Revolution* (1st ed.). Writing Revolution. https://drive.google.com/file/d/1kFYSu4uOe2g2XOTGzx_P1aD_Po6AiZpf/view?usp=sharing
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D. In *Alfabeta* (10th ed.). <https://www.pdfdrive.com/prof-dr-sugiyono-metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-intro-d56379944.html>
- Zharfandy, I. (2016). *Pengaruh Politik Identitas terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.